

POINTER
BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROVINSI LAMPUNG
KAMIS, 27 MEI 2021

1. Rencana Strategis Biro Organisasi Tahun 2019-2024

Mengacu Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan Biro Organisasi termasuk dalam Misi ke-2 yaitu Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.



Tujuan RENSTRA Biro Organisasi yaitu “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Pembentukan Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta ketatalaksanaan provinsi dan kab/kota” dengan 1 (satu) SASARAN, dan 1 (satu) INDIKATOR SASARAN.

Tabel 1.1 : Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Lampung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2019 (kondisi awal)	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Pembentukan Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja, Pembentukan Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	70	75	80	85	90	100

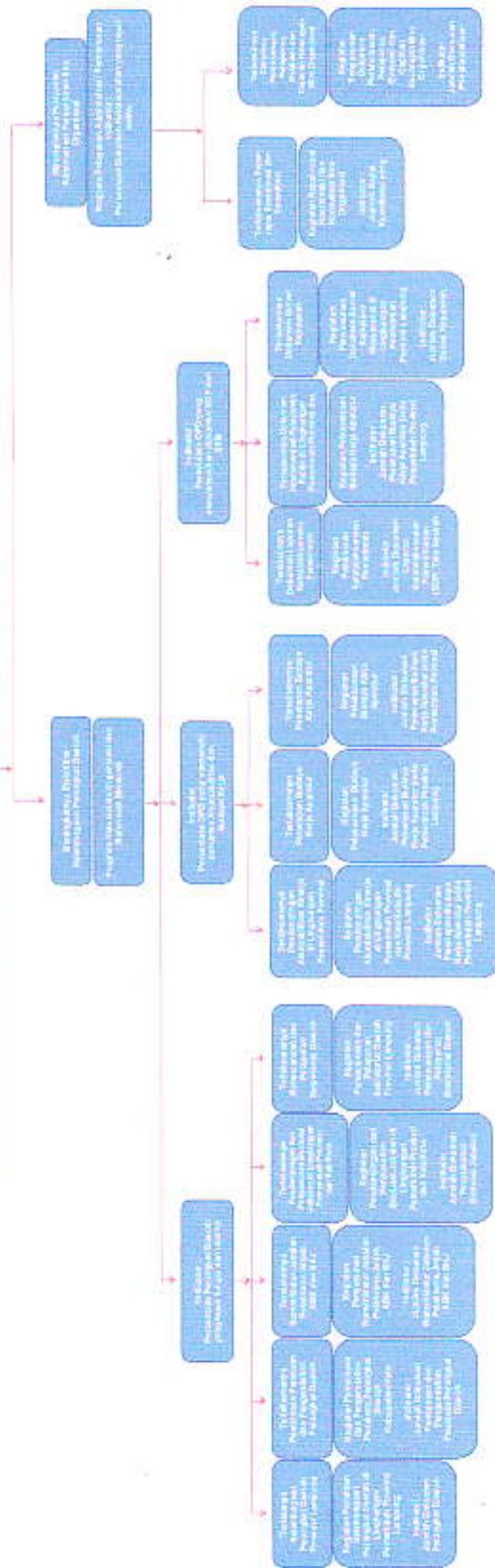
Keterangan : Terdapat 1 (satu) SASARAN dan 1 (satu) INDIKATOR SASARAN

Tableau 3 : Niveau d'adhésion à l'écologie pour les différents segments de la population

Figure 1. Proposed mechanism of action of the β -adrenergic agonist, albuterol.

Interpretation: The average rate of change in the number of U.S. deaths from 1990 to 2000 is 1.5 deaths per year.

Tujuan : Mengetahui pengaruh dari penggunaan alat bantu komunikasi terhadap kemampuan berbahasa pada anak dengan autisme spectrum disorder.



Keterangan: 1 (satu) SASARAN, 2 (dua) PROGRAM, dan 13 (tiga belas) KEGIATAN

2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Biro Organisasi melaksanakan **2 Program** dan **13 Kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.267.857.250,-** yang terdiri dari :

- **Belanja Langsung** sebesar **Rp. 1.267.857.250,-**
- **Realisasi Keuangan** pada tahun 2020 sebesar **Rp. 1.134.509.642** dengan persentase **89,48%**.
- Dengan realisasi anggaran tersebut, capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung secara umum adalah sebesar **100%**.

3. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN

HAMBATAN

Sebagai informasi penting, bahwa pada periode Tahun 2020 tengah terjadi Pandemic Covid-19 yang melanda lingkungan domestic, nasional dan global yang berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa hambatan/pemarsalahan yang dihadapi Biro Organisasi Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK); namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.
2. Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan schedule dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap wait and see dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika dan

kebijakan yang berkembang ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.

3. Memperhatikan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian/pengurangan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal.
4. Koordinasi dengan OPD yang melaksanakan pelayanan public masih dirasa sangat kurang baik ditingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kab/kota se-provinsi lampung.
5. Sumber daya manusia yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas.
6. Keterbatasan pemahaman OPD terkait pentingnya LKIP dan SAKIP.
7. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan OPD yang efektif karena kurangnya pertemuan dan waktu yang terbatas/deadline dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah.

UPAYA-UPAYA

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi, serta dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra, maka terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran maupun metode dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020, antara lain :

- Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas (di dalam maupun ke luar provinsi), ataupun kegiatan rapat-rapat dengan memanfaatkan media teknologi informasi (virtual meeting)
- Merancang skala prioritas dan re-schedule pelaksanaan kegiatan
- Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pengelola kegiatan senantiasa memperkuat koordinasi dan kemampuan manajerial serta kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan substantif.
- Pimpinan berkomitmen kuat dalam menyelenggarakan Reformasi Birokrasi.

8. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D TAHUN 2020

Memperhatikan capaian kinerja secara umum, Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2020. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 1 (satu) indikator sasaran.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Renstra 2019-2024
Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (2024)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2020		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Pembentukan Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran serta Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menginput LKE unit PMPRB Provinsi Lampung	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Pembentukan Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Ukuran Serta Tatalaksana Provinsi dan Kab/Kota	Persentase PID dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana)	75%	75%	100%

9. BEBERAPA KELUARAN (=OUTPUT) UTAMA DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

BAGIAN	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)
KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran	SUBBAG. KELEMBAGAAN
		1 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
		2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
		3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
		4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Satuan Pelayanan Pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
		5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
		6 Dokumen Fasiltasi/Rekomendasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
		7 Dokumen kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
		SUBBAG. ANALISIS JABATAN
		1 Peraturan gubernur lampung nomor: 48 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 79 tahun 2018 tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah provinsi lampung; tanggal 5 agustus 2020;
		2 Keputusan gubernur lampung nomor: g/47/b.07/hk/2020 tentang nomenklatur jabatan pelaksana dan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil pada pemerintah provinsi lampung; tanggal 22 januari 2020;

		3	Keputusan gubernur lampung nomor: g/90/b.07/hk/2020 tentang pembentukan tim pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah provinsi lampung; tanggal 6 februari 2020;
		4	Keputusan gubernur lampung nomor: g/91/b.07/hk/2020 tentang pembentukan tim evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi lampung; tanggal 6 februari 2020;
		5	Keputusan gubernur nomor: g/106/b.07/hk/2020 tentang pembentukan tim pengelolaan aplikasi system informasi manajemen analisis jabatan (simanja) online di lingkungan pemerintah provinsi lampung; tanggal 6 februari 2020
		6	Keputusan gubernur nomor: g/251/b.07/hk/2020 tentang pemberlakuan aplikasi system informasi manajemen analisis jabatan (simanja) online di lingkungan pemerintah provinsi lampung; tanggal 22 april 2020
		7	Keputusan gubernur lampung tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada 20 (dua puluh) perangkat daerah:
		1	Keputusan gubernur lampung nomor: g/502/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sekretariat daerah provinsi lampung;
		2	Keputusan gubernur lampung nomor: g/503/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi lampung;
		3	Keputusan gubernur lampung nomor: g/504/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung;
		4	Keputusan gubernur lampung nomor: g/505/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja badan penanggulangan bencana daerah provinsi lampung;
		5	Keputusan gubernur lampung nomor: g/506/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi lampung;
		6	Keputusan gubernur lampung nomor: g/507/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi lampung;

		7	Keputusan gubernur lampung nomor: g/539/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas komunikasi, informatika dan statistik provinsi lampung;
		8	Keputusan gubernur lampung nomor: g/540/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas pemberdayaan masyarakat, desa dan transmigrasi provinsi lampung;
		9	Keputusan gubernur lampung nomor: g/541/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas lingkungan hidup provinsi lampung;
		10	Keputusan gubernur lampung nomor: g/542/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi lampung;
		11	Keputusan gubernur lampung nomor: g/543/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas kehutanan provinsi lampung;
		12	Keputusan gubernur lampung nomor: g/544/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja badan penghubung provinsi lampung di jakarta;
		13	Keputusan gubernur lampung nomor: g/545/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi lampung;
		14	Keputusan gubernur lampung nomor: g/546/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi lampung;
		15	Keputusan gubernur lampung nomor: g/551/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas tenaga kerja provinsi lampung;
		16	Keputusan gubernur lampung nomor: g/552/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi lampung;
		17	Keputusan gubernur lampung nomor: g/572/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban

			kerja badan perencanaan pembangunan daerah provinsi lampung;
		18	Keputusan gubernur lampung nomor: g/573/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya provinsi lampung;
		19	Keputusan gubernur lampung nomor: g/574/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja satuan polisi pamong praja provinsi lampung;
		20	Keputusan gubernur lampung nomor: g/575/b.07/hk/2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas pemuda dan olahraga provinsi lampung;
		SUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
		1	Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024
		2	Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2020
		3	Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020
		4	Indikator Utama Kinerja (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 2019-2024
		5	Perjanjian Kinerja (PK) Setda Provinsi Lampung Tahun 2020
		6	Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Setda Provinsi Lampung Tahun 2020
		7	Dokumen Evaluasi Kinerja (LKj) Setda Provinsi Lampung Tahun 2020
		8	Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Setda Provinsi Lampung Tahun 2020
		9	Dokumen Cascading 2019-2024 9 (Sembilan) Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
		10	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2020
		11	Dokumen Cascading 2019-2024 9 (Sembilan) Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Persentase OPD yang memenuhi dokumen Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Budaya Kerja		SUBBAG REFORMASI BIROKRASI
		1	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
		2	Laporan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020.
		3	Laporan Asistensi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
			SUBBAG. AKUNTABILITAS KINERJA
		1	Perjanjian Kinerja (PK) Provinsi Lampung tahun 2020.
		2	SK Tim SAKIP Provinsi Lampung tahun 2020.
		3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019.
		4	Perubahan Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung tahun 2020.
		5	Cascade Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung 2021-2024
		6	Pohon Kinerja (POKIN) Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung 2021-2024
		7	Evaluasi Rencana Aksi s.d Triwulan II Tahun 2020.
		8	Rencana Aksi Tahun 2020 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
			SUBBAG. BUDAYA KERJA
		1	Dokumen Kelompok Budaya Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
		2	Dokumen Agen Perubahan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
		3	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
TATALAKSANA	Persentase Dokumen Ketatausahaan Yang Tepat Waktu		SUBBAG. TATA USAHA
		1	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.
		2	Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2021 dan Perubahan 2020.
		3	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 dan Perubahan Tahun 2020.
		4	Perjanjian Kinerja (PK) 2020 dan Perubahan 2020.
		5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020.
		6	ROK 2020 dan Perubahan.
		7	Dokumen Evaluasi Kinerja (LKj) 2020.
		8	Dokumen Evaluasi Renja 2020.

	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SOP dan SKM		SUBBAG. TATALAKSANA PEMERINTAHAN
		1	Dokumen Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
		2	Dokumen Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/399/B.07/HK/2020 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
		3	Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2020 dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
			SUBBAG. TATALAKSANA PELAYANAN PUBLIK
		1	Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Provinsi Lampung
		2	Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten/Kota